

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit
- Ahmad, Hamzah, dkk, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Fajar, Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kristian, dkk, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Narbuka, Cholid, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Pasek Diantha, I Made, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono, dkk, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta
- Soerjono, dkk, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 2018. Hukum Pidana I, Edisi Revisi. Semarang:Yayasan Sudarto

Sunardi, dkk, 2005, *Republik “Kaum Tikus”*; *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I*, Jakarta: Edsa Mahkota.

Syamsuddin, Azis, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Irene Svinarky, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli), **Jurnal Cahaya Keadilan**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 70-78, oct. 2016. ISSN 2339-1693. Available at: <<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/935>>. Date accessed: 25 oct. 2020

Halif, Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal ANTI KORUPSI – Vol. 1 No. 1 – Mei 2011 – PUKAT FHUJ, diunduh dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/62953/Kejahatan%20Korupsi%20Dalam%20Prespektif%20Kriminologi.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 22.30 wib.

Harjanto, Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Denda terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum, 2016, diunduh dari jurnal.untan.ac.id pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 10.30 wib.

Luh Mas Megawati, Pungutan Liar (Pungli) Dalam Kepengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Terhadap Warga Desa X (Suatu Tinjauan Mengenai Fraud), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undhiksa, Vol.8, No.2, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14610> diunduh pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 11.00 wib

Toha Solahuddin, “Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, Paraikatte, majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Volume 26 triwulan III, 2016

Internet

Wikipedia, “Pejabat Negara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara, diakses tanggal 06/02/2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan-Lembarran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Pasal 2 Perpes No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Pasal 3 Perpes No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Pasal 4 Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar